

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA SEHAT MELALUI HASIL SINTESIS CLUSTER INDIKATOR POKOK SARANA

Nur Anim Jauhariyah¹, Nihayatul Wafiroh²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
Indonesia

Email: animjauhariyah@gmail.com¹, nihayatulw79@gmail.com²

Abstract: Tourism is one sector that can contribute to certain regional incomes. Healthy tourism must be accompanied by facilities that support tourist needs. This research aims to analyze the priorities for healthy tourism development based on the main indicators of facilities in Banyuwangi Regency. The research method uses quantitative research by distributing questionnaires to expert respondents. Analysis uses an Analytic Network Process (ANP). The results of the research show that the value of Kendall's coefficient of concordance W (rater agreement) is 0.85. The diversity of scores given by each respondent contributed to the rater agreement figure of 85%. This shows that the level of agreement of respondents regarding the priority order in the tourism facilities sub-criteria is high, referring to facilities as an important indicator in serving tourists.

Keywords: *Tourism, Facilities, Analytical Network Process (ANP).*

Abstrak: Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah tertentu. Pariwisata yang sehat harus disertai dengan sarana yang mendukung kebutuhan wisatawan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prioritas pengembangan pariwisata sehat berdasarkan indikator pokok sarana di Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner ke responden expert. Analisis menggunakan *Analytic Network Process (ANP)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *kendall's coefficient of concordance W* (rater agreement) sebesar 0,85. Keragaman nilai yang diberikan oleh masing-masing responden turut menyumbang perolehan angka *rater agreement* sebesar 85% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden atas urutan prioritas pada sub kriteria sarana pariwisata adalah tinggi, mengacu sarana merupakan salah satu indikator penting dalam melayani wisatawan.

Kata Kunci: *Pariwisata, Sarana, Analytic Network Process (ANP)*

Introduction

Pariwisata sehat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tanggal 3 Agustus 2005 tentang Kabupaten/Kota Sehat, yang merupakan peran penting untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dalam mengembangkan sektor wisata yang tidak hanya memenuhi unsur kebersihan dan kesehatan namun juga upaya untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung.¹

Pemikiran Keynesian,² intervensi pemerintah sangat diperlukan pada saat terjadinya krisis terutama krisis akibat tidak terpenuhinya asumsi-asumsi dalam pemikiran ekonomik klasik seperti *full employment* dan distribusi pendapatan yang tidak merata.³ Dalam tradisi Keynesian keberadaan resesi merupakan buah dari kegagalan pasar secara luas, dalam kondisi ini kelompok Keynesian mampu menyediakan ruang secara ilmiah tentang intervensi pemerintah dalam perekonomian, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal *countercyclical*.⁴

Peran pemerintah dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan pernyataan Keynes dengan istilah kebijakan fiskal. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi akhirnya berkembang yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar.⁵

Para ahli lingkungan hidup menggunakan istilah *berkelanjutan* atau *berkesinambungan* (*sustainability*) dalam upaya memperjelas keseimbangan yang paling diinginkan antara pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan pelestarian lingkungan hidup atau sumber daya alam di sisi lainnya. Meskipun defisininya cukup banyak, namun pada dasarnya istilah *berkelanjutan* itu mengacu pada “pemuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan generasi-generasi mendatang”.⁶

Kabupaten Banyuwangi secara geografis terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkembangan. Daratan yang datar dengan berbagai produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan yang merupakan daerah

¹ Peraturan Bersama Mendagri Dan Menkes No. 34 Tahun 2005 Dan No. 1138/Menkes/Pb/Viii/2005 Tanggal 3 Agustus 2005 Tentang Kabupaten/Kota Sehat

² Spithoven, A. (2017). The Role Of Governments In Aligning Functional Income Distribution With Full Employment. *Journal Of Economic Issues*, 51(3), 688–697. <https://doi.org/10.1080/00213624.2017.1359035>.

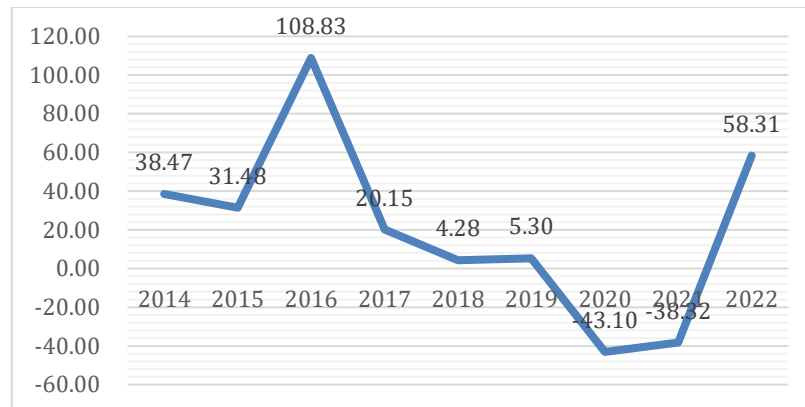
³ Keynes, J. M. (1973a). The General Theory Of Employment, Interest And Money. In *Education*. Cambridge University Press Cambridge,

⁴ Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi Solow*. Dharma Ilmu.

⁵ Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory Of Employment, Interest, And Money*. Diakses Di https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_Keynestheoryofemployment.pdf

⁶ Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesebelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga

penghasil biota laut.⁷ Kunjungan wisatawan Tahun 2013-2019 mengalami kenaikan yang signifikan, namun pada Tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang diakibatkan adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia, sehingga terjadi pembatasan jumlah kunjungan wisatawan untuk mencegah penyebaran penularan virus tersebut. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan selama Tahun 2013-2021, sedangkan data Tahun 2022 masih bersifat sementara. Berbagai upaya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama masyarakat untuk bangkitkan ekonomi diantaranya dengan menggeliatkan kembali sektor pariwisata.⁸



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Gambar 1. Menunjukkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami fluktuasi selama sepuluh tahun terakhir, dengan titik pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 108,83%, dan pertumbuhan sempat mengalami minus pada Tahun 2020 sebesar -43,10% dan 2021 sebesar -38,32%. Pada akhirnya pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai bangkit kembali dalam membangun ekonomi melalui sektor pariwisata.⁹

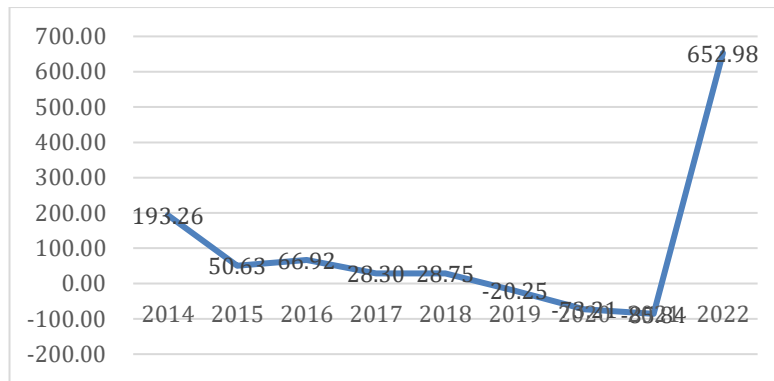
⁷ Nur Anim Jauhariyah, Et Al., (2022). Healthy Tourism Policy And Realizing Sustainable Development In Indonesia. 17(08). 1636-1651. Doi 10.5281/Zenodo.7019115.

<https://www.seyboldreport.org/article_overview?id=MDgyMDIyMTMyNDE4MTk2MjIw

⁸ BPS Kabupaten Banyuwangi. 2019. *Banyuwangi Dalam Angka 2019*. Bps Kabupaten Banyuwangi

⁹ Jauhariyah, Nur Anim; Syafa'at, Ahmad Munib; Khusnudin, Iman. Analisis Potret Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi. *Sifabri's*, [S.L.], V. 1, N. 1, P. 156-162, Aug. 2023. Issn 3025-3489. Available At:

<<https://Unars.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Sifabri/Article/View/3320>>



Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Gambar 2. Menunjukkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami fluktuasi selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan sempat mengalami minus pada Tahun 2019 sebesar -20,25%, Tahun 2020 sebesar -73,21%, dan 2021 sebesar -85,84%. Pada akhirnya pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai bangkit kembali dalam membangun ekonomi melalui sektor pariwisata dengan titik pertumbuhan tertinggi sebesar 652,98%.¹⁰

Theoretical Review

A. Teori Intervensi Pemerintah Keynes

Secara eksplisit Keynes menyatakan bahwa pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pemerintah, ekspor dan impor.¹¹ Adapun variabel-variabel lain yang menentukan naik turunnya pendapatan nasional adalah suku bunga, penerimaan pajak, pendapatan luar negeri, dan nilai tukar.

Keynes menyebutkan, "Changes in fiscal policy. In so far as the inducement to the individual to save depends on the future return which he expects, it clearly depends not only on the rate of interest but on the fiscal policy of the government. Income taxes, especially when they discriminate against 'unearned' income, taxes on capital-profits, death-duties and the like are as relevant as the rate of interest; whilst the range of possible changes in fiscal policy may be greater, in expectation at least, than for the rate of interest itself. If fiscal policy is used as a deliberate instrument for the more equal distribution of incomes, its effect in increasing the propensity to consume is, of course, all the greater"

Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya *"In the narrowest sense, the government's role in the economy is to help correct market failures, or situations where private markets cannot maximize the value that they could create for society. This includes providing public*

¹⁰ Jauhariyah, Nur Anim; Syafa'at, Ahmad Munib; Khusnudin, Iman. Analisis Potret Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi. *Sifabri's*, [S.L.], V. 1, N. 1, P. 156-162, Aug. 2023. Issn 3025-3489. Available At: <<https://Unars.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Sifabri/Article/View/3320>>

¹¹ Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory Of Employment, Interest, And Money*. Diakses Di https://Www.Files.Ethz.Ch/Isn/125515/1366_Keynestheoryofemployment.Pdf

goods, internalizing externalities, and enforcing competition. That said, many societies have accepted a broader role of government in a capitalist economy."¹²

Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik, mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta mendorong kompetisi/persaingan pasar yang sehat.

B. Ekonomi Kelembagaan

Salah satu peletak dasar-dasar Paham *Institutionalism classic* adalah Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, and John R. Commons,¹³ akan tetapi pengaruh dari Thorstein Veblen terlihat sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Meskipun menjadi pengkritik akan tetapi baik mahdzab neoklasik atau ekonomi kelembagaan memiliki titik persamaan terutama tentang peran pemerintah dalam hal penyediaan barang publik dan penanganan persoalan eksternalitas dari proses produksi (Cetin, 2012). Salah satu argumentasi ekonomi yang dapat diterima secara rasional tentang persoalan barang publik dan eksternalitas adalah ide tentang mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan barang publik dan tidak dapat mengatasi persoalan eksternalitas.¹⁴

Akar dari ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) pada dasarnya merupakan produk pemikiran yang melakukan kritik terutama dalam mengkritik pemikiran ekonomi neoklasik dimana menganggap bahwa peran pemerintah dalam perekonomian harus dibatasi, karena terdapat kemungkinan terjadinya misalokasi sumber daya secara tidak efisien, serta memungkinkan terjadinya *government failure*. Melalui perangkat aturan kemudian pemikiran *institutionalism* ini menjadi inti dari kelompok pemikiran ekonomi yang kemudian menjadi *institutional economics*. Istilah *institutional economics* disampaikan dalam *Annual Meeting American Economic Association*.¹⁵ Dalam artikel tersebut secara mendasar menyatakan bahwa perbedaan utama antara pemikiran neoklasik dalam ekonomi dengan apa yang dia sebut sebagai *Institutionalist Economist* adalah neoklasik yang sangat mekanistik bagi *Institutionalist Economist* dalam proses produksi terdapat seperangkat aturan yang dibuat untuk memaksa untuk mengatur perilaku manusia dalam melakukan aktivitas.¹⁶

¹² Moffat, Mike. 2019. The Government's Role In The Economy. Agustus 22. Thoughtco.Com/The-Governments-Role-In-The-Economy-1147544.

¹³ Rutherford, M. (2001). Institutional Economics: Then And Now. *Journal Of Economic Perspectives*, 15(3), 173–194. <https://doi.org/10.1257/Jep.15.3.173>

¹⁴ Tulkens, H. (2006). *Public Goods , Environmental Externalities*. Springer Science+ Business Media New York

¹⁵ Hamilton, W. H. (1919). The Institutional Approach To Economic Theory. *The American Economic Review*, 9(1), 309–318.

¹⁶ Klein, M. 2005. *Survival Analysis A Self Learning Text*. Springer-. Verlag: New York.

C. Teori Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu¹⁷:

- 1) Proses pembuatan kebijakan, merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
- 2) Proses implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- 3) Proses evaluasi kebijakan, merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Dunn, proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: 1) Penyusunan agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi kebijakan, 4) Implementasi kebijakan, dan 5) Penilaian kebijakan.¹⁸

Methods

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik.¹⁹

Quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables, in turn, can be measured, typically on instruments, so that numbered data can be analyzed using statistical procedures.²⁰

Penelitian ini mengambil sampel penelitian dengan teknik *Judgement (purposive) sampling*. Penarikan sampel dengan teknik *Judgement (purposive) sampling* adalah prosedur yang biasa dilakukan peneliti “berpengalaman” dalam memilih sampel berdasarkan “pertimbangan” tentang beberapa karakteristik yang cocok berkaitan dengan anggota sampel yang diperlukan untuk menjawab tujuan dalam penelitiannya.²¹ Penelitian ini mengangkat tentang kebijakan pengembangan pariwisata sehat di Kabupaten Banyuwangi, responden dalam penelitian ini dikhususkan untuk responden yang *expert* atau ahli dan mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang kebijakan pengembangan pariwisata sehat

¹⁷ Hogwood, Brian W., Gunn, Lewis A. 1984. *Policy Analysis For The Real. World*. Oxford University

¹⁸ Dunn, W.H. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

¹⁹ Anim JauhariyahN., & MahmudahM. (2023). Empowering Students In Improving The Economy Of Pesantren Through Sustainable Waste Management. *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement, 4*, 233-240. Retrieved from <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1520>

²⁰ Creswell, J. 2003. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

²¹ Juanda, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Bogor: Ipb Press.

tersebut. Kenapa demikian, karena tidak semua responden di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengetahui tentang kebijakan tersebut. Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; dan
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- 4) Forum Banyuwangi Sehat
- 5) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Target dan Capaian Kawasan Pengembangan Pariwisata Sehat Indikator Pokok Sarana Pariwisata di Kawasan wisata. Analisis data yang digunakan dalam pengembangan pariwisata sehat di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada permasalahan menggunakan analisis skala target dan capaian kawasan pariwisata sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Capaian Kawasan Pengembangan Pariwisata Sehat Indikator Pokok Sarana Pariwisata

No	Indikator Khusus	Skor
1	Persentase restoran yang laik hygiene	
	a. >75% restoran yang laik hygiene	100
	b. 25% - 74% restoran yang laik hygiene	50
	c. <25% restoran yang laik hygiene	0
2	Prosentase sarana akomodasi pariwisata yang laik sehat	
	a. > 75% akomodasi yang laik	100
	b. 25% - 74% akomodasi yang laik	50
	d. < 25% akomodasi yang laik	0
3	DTW Tidak mencemari lingkungan	
	a. Seluruhnya tidak mencemari	100
	b. Sebagian tidak mencemari	50
	c. Mencemari lingkungan	0
4	Terjaminnya kebersihan lingkungan	
	a. Seluruhnya bersih	100
	b. Sebagian bersih	50
	c. Kebersihan tidak terjamin	0
5	DTW Ramah Difabel	
	a. Seluruhnya ramah difabel	100
	b. Sebagian ramah difabel	75
	c. Tidak ramah difabel	0

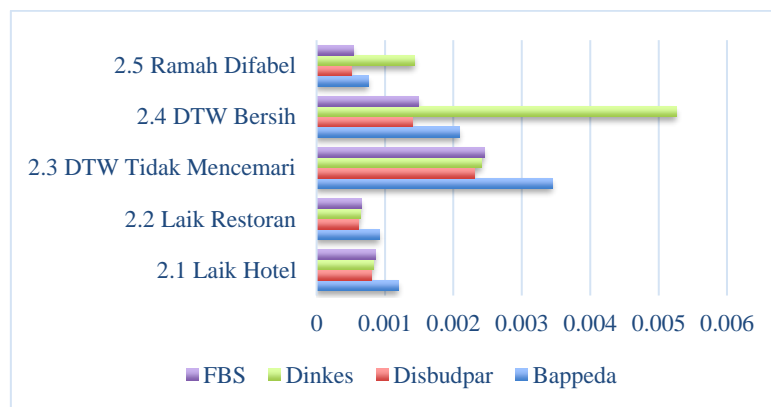
Sumber: Kemenkes dan Kemendagri, 2005 (diolah)

Pada Tabel 1. Target dan Capaian Kawasan Pengembangan Pariwisata Sehat Indikator Pokok Sarana Pariwisata terdiri dari lima indikator khusus yang terdiri dari persentase restoran laik dan akomodasi sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, DTW yang tidak mencemari lingkungan, kebersihan lingkungan, dan DTW yang ramah terhadap pengunjung yang memiliki keterbatasan fisik. Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan *Analytic Network Process*

(ANP), ANP merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. ANP sebagai suatu pendekatan alternatif baru untuk studi kualitatif yang dapat mengkombinasikan nilai-nilai Intangible dan judgement subyektif dengan data-data statistik dan faktor-faktor tangible lainnya.²²

Results and Discussion

Hasil sintesis cluster Sarana pariwisata pada pengembangan pariwisata sehat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten di ujung pulau jawa yang menampilkan kondisi prioritas dari elemen-elemen pada cluster Sarana pariwisata menurut pandangan pakar dengan menampilkan hasil rata-rata dari keseluruhan responden. Hasil cluster tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. sebagai berikut.

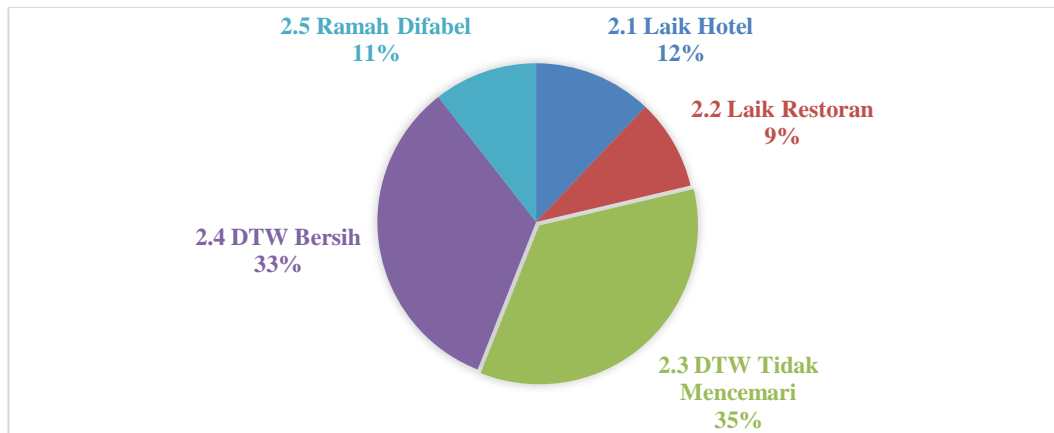


Gambar 3. Hasil Sintesis Prioritas Sarana Pariwisata Berdasarkan Masing-masing Responden²³

Gambar 1. menunjukkan perbandingan dari nilai kesepakatan antar responden dalam menentukan prioritas dalam ketersediaan sarana pariwisata yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata sehat supaya dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil sintesis prioritas sarana wisata berdasarkan *geometrik mean* sebagai berikut.

²² Saaty, L. Thomas And Luis G. Vargas. 2012. *Models, Methods, Concepts & Applications Of The Analytic Hierarchy Process*. Springer New York Heidelberg Dordrecht London. Doi 10.1007/978-1-4614-3597-6

²³ Hasil analisis kuesioner responden expert, 2023



Gambar 4. Geometrik Mean Sarana Parwisata²⁴

Pada Gambar 4. di atas menunjukkan bahwa sub kriteria Sarana Pariwisata yang menjadi prioritas yang disepakati responden sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan sarana obyek dan daya tarik wisata tidak mencemari lingkungan ini menunjukkan kondisi pengolahan limbah dan sampah di destinasi wisata sudah dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan dengan prosentase sebesar 35%;
- 1) Ketersediaan sarana obyek dan daya tarik wisata terjamin kebersihan lingkungan ini menunjukkan kondisi lingkungan di destinasi wisata dan pendukungnya yang bersih bebas dari sampah yang tidak terkendali dengan prosentase sebesar 24%;
- 2) Sertifikat laik hotel meningkat ini menunjukkan adanya peningkatan hotel layak sehat merupakan bagian promosi untuk meyakinkan para wisatawan untuk lebih nyaman dalam berwisata dan menggunakan sarana menginap di hotel di sekitar destinasi wisata yang dikunjungi dengan prosentase sebesar 12%;
- 3) Ramah Difabel ini menunjukkan sarana di destinasi wisata dapat diakses juga oleh pengunjung dengan kebutuhan khusus dengan prosentase 11%;
- 4) Sertifikat laik restoran meningkat ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah restoran layak sehat bagian promosi untuk lebih membuat wisatawan merasa aman dalam mengkonsumsi makanan di sekitar destinasi wisata yang dikunjungi dengan prosentase sebesar 9%.

Tabel 2. Nilai Prioritas Sarana Pariwisata Sebelum ditransformasi²⁵

Name	Bappeda	Disbudpar	Dinkes	FBS
2.1 Laik Hotel	0,001202	0,000805	0,000839	0,000857
2.2 Laik Restoran	0,000916	0,000614	0,00064	0,000653

²⁴ Hasil analisis kuesioner responden expert, 2023

²⁵ Analisis ANP, 2023

2.3 DTW Tidak Mencemari	0,003449	0,00231	0,002407	0,002459
2.4 DTW Bersih	0,002088	0,001399	0,00526	0,001489
2.5 Ramah Difabel	0,000754	0,000505	0,001438	0,000538

Tabel 2. menunjukkan nilai prioritas sarana pariwisata pada masing-masing responden sebelum dilakukan transformasi. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan *W* (*rater agreement*) di awali dengan:

- 1) Melakukan transformasi nilai prioritas pada sarana pariwisata;
- 2) Melakukan ranking;
- 3) Menghitung nilai *W*.

Proses sebelum mendapatkan nilai *W*, maka diawali dengan melakukan penentuan prioritas cluster hingga akhirnya ditransformasi untuk di ranking sebelum melakukan perhitungan nilai *W* dengan metode *kendall's coefficient of concordance*.

Tabel 3. Nilai Prioritas Sarana Pariwisata Sesudah ditransformasi²⁶

Sarana Pariwisata	2.1 Laik Hotel	2.2 Laik Restoran	2.3 DTW Tidak Mencemari	2.4 DTW Bersih	2.5 Ramah Difabel
Bappeda	0,001202	0,000916	0,003449	0,002088	0,000754
Disbudpar	0,000805	0,000614	0,00231	0,001399	0,000505
Dinkes	0,000839	0,00064	0,002407	0,00526	0,001438
FBS	0,000857	0,000653	0,002459	0,001489	0,000538

Sumber: Data Primer, diolah

Setelah menentukan nilai prioritas maka selanjutnya ditentukan ranking pada sub kriteria pada kriteria sarana pariwisata dalam menentukan prioritas kebijakan pengembangan pariwisata sehat sebagai berikut.

Tabel 4. Nilai Prioritas Sarana Pariwisata Setelah diranking²⁷

Sarana Pariwisata	2.1 Laik Hotel	2.2 Laik Restoran	2.3 DTW Tidak Mencemari	2.4 DTW Bersih	2.5 Ramah Difabel
Bappeda	3	4	1	2	5
Disbudpar	3	4	1	2	5
Dinkes	4	5	2	1	3
FBS	3	4	1	2	5
TOTAL	13	17	5	7	18

²⁶ Hasil Analisis Data Primer Tahun 2023

²⁷ Hasil Analisis Data Primer Tahun 2023

$(T_i - U)^2$	1	25	49	25	36
n	4	8	12	16	20
$(n - U)^2$	64	16	0	16	64
U	60				
S	136				
Max S	160				
<i>kendall's coefficient of concordance (W)</i>	0,85				

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4. menunjukkan bahwa hasil analisis nilai *kendall's coefficient of concordance W* (rater agreement) sebesar 0,85. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden atas hasil prioritas pada cluster sarana wisata adalah tinggi. Keragaman nilai yang diberikan oleh masing-masing responden turut menyumbang perolehan angka *rater agreement* sebesar 85% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden atas urutan prioritas pada sub kriteria sarana pariwisata adalah tinggi.

Sarana pariwisata perlu dijaga terutama dalam memperhatikan kebersihan lingkungan dalam pengelolaan sampah.²⁸ Pelaksanaan pengembangan tersebut sangat memerlukan peran pemberdayaan masyarakat, diantaranya peningkatan ekonomi menjadi salah satu tujuan sebagai pengungkit kesejahteraan masyarakat. Melalui ekonomi yang berkelanjutan diharapkan akan mampu menjaga kesinambungan dari ekosistem pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.²⁹

Conclusion

Intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga sektor publik yang tidak tersentuh atau tidak dapat dikelola oleh sektor privat. Seperti halnya sektor pariwisata yang sangat memerlukan intervensi pemerintah dalam menyediakan sarana yang diperlukan oleh wisatawan yang berkunjung ke pariwisata tersebut Berdasarkan hasil keragaman nilai yang diberikan oleh masing-masing responden turut menyumbang perolehan angka *rater agreement* sebesar 85% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan responden atas urutan prioritas pada sub kriteria sarana pariwisata adalah tinggi, mengacu sarana merupakan salah satu indikator penting dalam melayani wisatawan.

²⁸ Jauhariyah, Nur Anim, Susanti, Nawal Ika, Indana, Fatiha. (2023). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah Secara Berkelanjutan. *LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, v. 6, n. 2, p. 116-127. <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/2250>>

²⁹ Ahmad Munib Syafa'at, & Nur Anim Jauhariyah. (2023). Analisis Faktor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren. *ICO EDUSHA*, 3(1), 71–80. Retrieved from <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/227>

References

- Ahmad Munib Syafa'at, & Nur Anim Jauhariyah. (2023). Analisis Faktor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren. *ICO EDUSHA*, 3(1), 71–80. Retrieved from <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/227>.
- BPS Kabupaten Banyuwangi. 2019. *Banyuwangi Dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Creswell, J. 2003. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dunn, W.H. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Juanda, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Bogor: Ipb Press.
- Hamilton, W. H. (1919). The Institutional Approach To Economic Theory. *The American Economic Review*, 9(1), 309–318.
- Hogwood, Brian W., Gunn, Lewis A. 1984. *Policy Analysis For The Real World*. Oxford University
- Jauhariyah, Nur Anim; Syafa'at, Ahmad Munib; Khusnudin, Iman. Analisis Potret Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi. *Sifebri's*, [S.L.], V. 1, N. 1, P. 156-162, Aug. 2023. Issn 3025-3489. Available At: <<https://Unars.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Sifebri/Article/View/3320>>
- Jauhariyah, Nur Anim; Syafa'at, Ahmad Munib; Khusnudin, Iman. Analisis Potret Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi. *Sifebri's*, [S.L.], V. 1, N. 1, P. 156-162, Aug. 2023. Issn 3025-3489. Available At: <<https://Unars.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Sifebri/Article/View/3320>>
- Jauhariyah. N. A., & MahmudahM. (2023). Empowering Students In Improving The Economy Of Pesantren Through Sustainable Waste Management. *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 4, 233-240. Retrieved from <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1520>.
- Jauhariyah, Nur Anim, Susanti, Nawal Ika, Indana, Fatiha. (2023). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah Secara Berkelanjutan. *LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, v. 6, n. 2, p. 116-127. <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/2250>>
- Keynes, J. M. (1973a). *The General Theory Of Employment, Interest And Money*. In *Education*. Cambridge University Press Cambridge,
- Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory Of Employment, Interest, And Money*. Diakses Di https://Www.Files.Ethz.Ch/Isn/125515/1366_Keynestheoryofemployment.Pdf
- Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory Of Employment, Interest, And Money*. Diakses Di https://Www.Files.Ethz.Ch/Isn/125515/1366_Keynestheoryofemployment.Pdf
- Klein, M. 2005. *Survival Analysis A Self Learning Text*. Springer-. Verlag: New York.
- Moffat, Mike. 2019. *The Government's Role In The Economy*. Agustus 22. Thoughtco.Com/The-Governments-Role-In-The-Economy-1147544.
- Peraturan Bersama Mendagri Dan Menkes No. 34 Tahun 2005 Dan No. 1138/Menkes/Pb/Viii/2005 Tanggal 3 Agustus 2005 Tentang Kabupaten/Kota Sehat.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi Solow*. Dharma Ilmu.
- Rutherford, M. (2001). Institutional Economics: Then And Now. *Journal Of Economic Perspectives*, 15(3), 173–194. <https://Doi.Org/10.1257/Jep.15.3.173>.
- Saaty, L. Thomas And Luis G. Vargas. 2012. *Models, Methods, Concepts & Applications Of The Analytic Hierarchy Process*. Springer New York Heidelberg Dordrecht London. Doi 10.1007/978-1-4614-3597-6
- Spithoven, A. (2017). The Role Of Governments In Aligning Functional Income Distribution With Full Employment. *Journal Of Economic Issues*, 51(3), 688–697. <https://Doi.Org/10.1080/00213624.2017.1359035>.
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesebelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tulkens, H. (2006). *Public Goods , Environmental Externalities*. Springer Science+ Business Media New York